

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara dengan tipe daerah tropis yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Curah hujan di Indonesia cukup tinggi dan memiliki cadangan air bersih yang melimpah, namun kenyataannya tidak semua daerah memiliki cadangan air bersih dan melimpah, sehingga masih ada daerah yang susah mendapatkan air bersih. Menurut surat kabar harian Radar Lampung (2015), di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung setiap tahunnya mereka mengalami kekeringan, kesusahan untuk mendapatkan air bersih, dan pada puncaknya ketika musim kemarau tiba, akibatnya warga terpaksa mengeluarkan uang agar bisa mendapatkan air, bahkan hanya untuk minum sehari-hari. Selain membeli, sebagian dari mereka terpaksa meminta air kepada tetangga yang menggunakan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, karena itu air merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk kelangsungan kehidupan makhluk hidup.

Salah satu bencana kekeringan yang terjadi di Kecamatan Sukabumi, dimana sudah dipastikan separuh lebih wilayah di setiap kelurahan terkena dampak bencana kekeringan selama musim kemarau setiap tahunnya.

Berdasarkan pra-riset yang dilakukan penulis pada Selasa, 24 Maret 2015 di kantor Kecamatan Sukabumi, penulis mendapatkan data pendukung terkait luas wilayah geografis dan administratif Kecamatan Sukabumi. Kecamatan Sukabumi dengan luas wilayah 30,63 km<sup>2</sup> setelah pemekaran yang terdiri dari 7 kelurahan masing-masing sebagai berikut :

**Tabel 1.Luas Kelurahan Se-Kecamatan Sukabumi**

No	Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Sukabumi	2,71
2	Sukabumi Indah	2,71
3	Campang Raya	3,51
4	Campang Jaya	6,73
5	Nusantara Permai	2,50
6	Way Gubak	5,66
7	Way Laga	6,81
<b>Jumlah</b>		<b>30,63 km<sup>2</sup></b>

*Sumber: Kantor Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung*

Berdasarkan tabel di atas, tercatat kurang lebih 5 kelurahan yang mengalami kekeringan cukup parah, diantaranya :

1. Kelurahan Sukabumi
2. Kelurahan Sukabumi Indah
3. Kelurahan Campang Raya
4. Kelurahan Campang Jaya
5. Kelurahan Nusantara Permai

Di 5 kelurahan yang terdiri 3217 kepala keluarga Kelurahan Sukabumi, 1832 kepala keluarga Kelurahan Sukabumi Indah, 2160 kepala keluarga Kelurahan Nusantara Permai, 1492 kepala keluarga Kelurahan Campang Raya, 2306 kepala keluarga Kelurahan Campang Jaya, setiap kelurahannya menyatakan daerahnya mengalami kekeringan.

Pernyataan yang diungkapkan oleh Yasmala (40 tahun) warga Kelurahan Campang Raya, selain membeli dengan harga Rp.2.000,- untuk satu drigennya, ada juga sebagian dari mereka yang terpaksa meminta air kepada tetangga yang menggunakan sumur bor, selama musim kemarau ini warga mengandalkan sumur bor dari pemerintah setempat, namun sayang jaraknya masih terlalu jauh dari rumah tinggal warga. Selain itu, volume airnyapun mulai berkurang akibat kemarau, dan akibat dari belum terpenuhinya kebutuhan air, wargapun membuat sumur bor sendiri hanya untuk mendapatkan air bersih.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Erawati (46 tahun) warga Kelurahan Sukabumi, karena jumlah anggota keluarga yang banyak ia terpaksa mengeluarkan biaya Rp.150.000,- setiap minggu untuk membeli air bersih selama tiga bulan berturut-turut. Warga berharap Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat memberikan bantuan pasokan air bersih, karena mereka membutuhkannya untuk keperluan sehari-hari, selain itu mereka mengharapkan pemerintah setempat membangun sumur bor yang dekat dengan pemukiman warga, karena letak sumur masih terlalu jauh dari rumah tinggal warga. Jumlah sumur bor yang masih terhitung minim, yaitu 25 sumur bor untuk setiap kelurahan yang mengalami

kekeringan, sehingga yang dirasa oleh warga bantuan air bersih yang dikelola oleh BPBD Kota Bandar Lampung belum optimal.

Dampak akibat bencana kekeringan cukup memberikan pengaruh terhadap aktivitas warga sehari-hari, misalnya saja seperti mencuci, karena sumur bor yang disediakan untuk wargapun kering sehingga ibu-ibu yang biasanya memanfaatkan air untuk mencuci tidak lagi bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dikarenakan sumur bor yang kering. Walaupun sudah mengebor air, kalau puncak kemarau tiba tetap saja tekor, bisa sampai 1 hari dilakukan 5 kali, apalagi dengan jumlah keluarga yang ramai, kebutuhan airnya juga akan banyak, sehingga warga membuat lagi 5 titik sumur bor yang baru dan itupun belum cukup membantu, karena masih banyak warga yang rumahnya memakai sumur buatan dan ketika kemarau tiba sumur menjadi kering kerontang.

Masih dari sumber yang sama, Erawati (46 tahun) dijelaskan bahwa PAM pernah melakukan survei ke Kelurahan Sukabumi, tetapi belum melakukan pemasangan, karena curah hujan di daerahnya termasuk yang sangat jarang, sehingga warga sangat mengharap bantuan dari PAM. Berdasarkan hasil pra-riset tersebut, bencana kekeringan yang terjadi di Kecamatan Sukabumi menjadi suatu masalah yang harus segera untuk ditanggulangi, karena kekeringan ini sudah dirasakan warga setiap tahunnya. Namun hingga kini upaya pemerintah kota dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung belum cukup untuk mengantisipasi dampak kemarau yang menyebabkan kekeringan dan kesulitan air bersih. Secara empiris penulis mengamati bahwa di Kecamatan

Sukabumi selama kekeringan terjadi, masyarakat yang kurang mampu harus mengeluarkan uang yang lebih untuk bisa mendapatkan air bersih, sehingga Pemkot dan BPBD terkesan tidak memerhatikan warga di Kecamatan Sukabumi.

Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani. Berdasarkan beberapa informasi yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa di 5 kelurahan masih mengeluh susah mendapatkan air bersih. Selain hal tersebut, permasalahan tentang kekeringan juga terjadi di beberapa kelurahan lainnya di wilayah Sukabumi. Permasalahan yang dimaksud tersebut, didukung dengan data dari BPBD.

Secara khusus penanggulangan bencana ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hal ini dikarenakan BPBD merupakan unsur pelaksana yang memunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dan sebagai unsur pelaksana penyelenggara penanggulangan bencana yang ada di daerah. Ketentuan mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja lembaga BPBD diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung. Pembentukan BPBD Kota Bandar Lampung sendiri diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2009 yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Nomor 70 tahun 2010 tentang tugas,

fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung, dengan payung hukum tertinggi pembentukan BPBD adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. BPBD memiliki tanggungjawab besar dalam kegiatan pencegahan bencana baik mulai tahap kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi agar dapat dijadikan sebagai organisasi yang berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu. Upaya mengantisipasi dan mencegah potensi bencana kekeringan di Kota Bandar Lampung agar tidak terulang kembali membutuhkan peran dan sikap yang ditangani bersama oleh pemerintah, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat karena pada hakikatnya setiap pihak dapat memberikan kontribusi pelayanan terhadap ancaman bencana.

Terutama dalam hal ini yang sangat dibutuhkan perannya adalah pihak Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang bertanggungjawab pada upaya penanggulangan bencana yang secara khusus ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung, namun dalam perjalanannya BPBD Kota Bandar Lampung sejak 2012 sampai 2014 awal BPBD masih minim program kerja, dalam surat kabar harian Radar Lampung (2014), Komisi D DPRD Bandar Lampung yang menyoroti kinerja BPBD bahwa BPBD miskin program ditanggapi santai satuan kerja tersebut, kepala BPBD Kota Bandar Lampung mengatakan, pihaknya tidak menanggapi tudingan tersebut karena memang tidak banyak program yang dilaksanakan di tahun 2012.

Sedangkan pada tahun 2014 ini, banyak program yang tidak dianggarkan oleh badan anggaran atau banang.

Berdasarkan pra-riset pada Selasa, 23 Maret 2015 di kantor BPBD, selain dukungan fasilitas sarana dan prasarana, dukungan sumber daya manusia (SDM) diperlukan untuk mencapai tujuan dan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam menentukan tugas-tugas kebencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar BPBD dapat menunjukkan dan memaksimalkan kinerja dan perannya sebagai penyelenggara penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda).

Menanggapi pernyataan beberapa masyarakat di atas, di tempat yang berbeda, diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kota Bandar Lampung bahwa PAM terpisah dari prosedur tanggungjawab BPBD dan memang BPBD sudah menerima laporan bahwa tingkat kekeringan di Kecamatan Sukabumi cukup tinggi, dan diakui bahwa BPBD memberikan bantuan hanya pada saat musim kemarau tiba, apabila masyarakat mengalami kekeringan pada saat musim hujan tiba BPBD tidak mengirim air bersih.

Di tempat berbeda, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sukabumi menjelaskan bahwa struktur tanah yang tandus juga mengakibatkan air yang tertampung di telaga cepat habis, karena apabila masuk pada puncak musim kemarau telaga tersebut akan mengering. Selain itu penyebab terjadinya kekeringan sumber air adalah penggunaan air tanah yang meningkat, perubahan

penggunaan lahan, kondisi iklim yang tak seimbang, penurunan curah hujan, serta jumlah cadangan air tanah akan cenderung semakin mengalami penurunan dari waktu ke waktu menjadi salah satu faktor penyebab bencana.

Masih dari sumber yang sama, beliau menjelaskan bahwa tidak adanya koordinasi antara pihak kelurahan dan pihak kecamatan dalam mengomunikasikan masalah kekeringan di daerahnya, karena apabila setiap kelurahan membutuhkan air bersih biasanya kelurahan tersebut langsung menghubungi BPBD tanpa melalui kecamatan terlebih dahulu, menurut beliau seharusnya kelurahan yang mengalami kekeringan dan membutuhkan air bersih harus melapor terlebih dahulu ke kantor kecamatan sehingga kecamatan bisa mendata wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan.

Salah satu strategi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah program air bersih dari pemerintah, pembuatan sumur bor yang dekat dengan pemukiman warga dan masuknya PAM ke daerah yang mengalami kekeringan sangat parah misalnya Kelurahan Sukabumi, Kelurahan Sukabumi Indah, dan kelurahan lainnya di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Program air bersih dan masuknya PAM ke daerah tersebut sangat diharapkan warga untuk menjaga kesehatan keluarga, terutama air sebagai sumber kehidupan, karena berdasarkan pra-riset pada Senin, 23 Maret 2015 di Kecamatan Sukabumi, daerahnya memang memiliki curah hujan yang rendah dibandingkan dengan daerah lain pada umumnya.

Selama ini telah dilakukan beberapa upaya untuk menanggulangi kekeringan di sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kabar harian *Republika* (2014), bahwa Wali Kota Bandar Lampung mendistribusikan 10 tangki air bersih, sejak awal September 2014. Upaya itu demi membantu keperluan air masyarakat yang mengalami kekeringan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung, melaporkan, distribusi tangki dilakukan melalui BPBD Kota Bandar Lampung. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut membantu dengan mengirimkan mobil tangki ke setiap titik wilayah yang mengalami kekeringan. Masih dari sumber yang sama, ia menjelaskan, pemerintah daerah di masing-masing daerah memang berusaha mengatasi kekeringan di wilayahnya dengan mengerahkan beberapa tangki air, pompa air, dan bantuan air, menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung, solusi untuk mengatasi kekeringan adalah dengan upaya menyeluruh dan komitmen politik yang kuat misalnya seperti pembangunan waduk, pengelolaan daerah aliran sungai, serta konservasi tanah, air, dan lainnya.

Di Kecamatan Sukabumi khususnya, dijelaskan oleh Sekretaris BPBD Kota Bandar Lampung, BPBD sudah berupaya melakukan pengeboran di setiap titik wilayah yang mengalami kekeringan dan menyosialisasikan kepada warganya untuk membuat sumur resapan air maupun lubang biopori di rumah tinggal masing-masing. Biopori ini adalah pengambilan air tanah yang tidak diimbangi dengan semangat konservasi, yaitu dengan memasukkan air hujan ke dalam tanah

akan berakibat pada berkurangnya ketersediaan air tanah. Pada daerah yang baru terbangun, dengan mengubah *ground cover* dari bahan yang tidak ramah pada sumberdaya air, dari sawah atau tegalan menjadi permukiman dengan segala bentuk bahan perkerasan halamannya, membuat debit air larian meningkat drastis, sehingga masyarakat dalam pemenuhannya akan air bersih memanfaatkan keberadaan air tanah dengan membuat sumur dangkal. Tampak bahwa suatu lingkungan apabila ada perubahan kondisi permukaan tanahnya dari yang alami ke non-alami, pasti akan terjadi limpasan air larian (dari hujan) yang meningkat, mengakibatkan kekeringan pada musim kemarau, kemudian, masih dari sumber yang sama, beliau menambahkan bahwa BPBD membantu masyarakat di Kecamatan Sukabumi dengan menyediakan distribusi air ke wilayah yang mengalami kekeringan cukup parah.

Studi yang serupa pernah dilakukan di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur oleh Ferry Irfan Nurrahman, menggambarkan bahwa bantuan air bersih yang dikelola oleh BPBD Kabupaten Lamongan dan PDAM juga masih belum optimal, beberapa upaya adaptasi untuk menghadapi bahaya kekeringan di Kabupaten Lamongan seperti bantuan air bersih masih belum memberikan dampak yang nyata untuk menghadapi kekeringan. Hal ini disebabkan karena sifatnya yang masih terpaku pada respon penyediaan suplai atas kebutuhan air, BPBD belum melakukan koordinasi sesuai dengan tupoksi, karena anggaran yang diberikan dari pemerintah pusat mengalami keterlambatan. Dari penelitian terdahulu, yang relevan di atas memunyai jenis analisis data yang sama yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian persamaan yang mendasar dalam

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti upaya BPBD menghadapi kekeringan, berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam Penanggulangan Kekeringan di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, sehingga penelitian terdahulu menjadi acuan atau referensi sendiri bagi peneliti kemudian, yang membedakannya adalah fokus penelitian terdahulu dan fokus penelitian yang peneliti ambil.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam usulan penelitian ini adalah bagaimanakah rencana strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan kekeringan di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rencana strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan kekeringan yang terjadi di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dan sebagai bahan referensi bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lanjutan pada bidang yang sama.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbang saran dan masukan bagi Pemerintah khususnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung.

3) Manfaat Penulis

Adapun manfaat langsung bagi penulis yaitu dapat menambah dan memerluas wawasan pengetahuan dalam penulisan proposal penelitian skripsi yang terkait masalah yang diteliti, serta merupakan tugas bagi penulis dalam menyelesaikan studi.